Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Meningkatkan Daya Saing Destinasi

Keukeu Nurul Latifah *1

Ayuni Anggun Pratiwi 2

Depi Indriani 3

Lina Marlina 4

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002145@student.unsil.ac.id¹, 231002147@student.unsil.ac.id²,
231002163@student.unsil.ac.id³ linamarlina@gmail.com⁴

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan devisa negara, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap ajaran Islam, muncul kebutuhan akan konsep pariwisata halal sebagai salah satu inovasi dalam industri pariwisata global. Pariwisata halal didefinisikan sebagai bentuk layanan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik dari segi penyediaan fasilitas, produk, maupun aktivitas wisata.

Kata kunci: pariwisata, halal

Abstract

Tourism is one of the strategic sectors that can drive economic growth, increase national foreign exchange earnings, and create business opportunities as well as job openings for the community. Along with the growing awareness of Muslims towards Islamic teachings, the need for the concept of halal tourism has emerged as an innovation in the global tourism industry. Halal tourism is defined as a form of tourism service that complies with Islamic Sharia principles, both in terms of facilities, products, and tourism activities

Keywords tourism, halal

PENDAHULUAN

Konsep ini tidak hanya mencakup tersedianya makanan dan minuman halal, tetapi juga meliputi fasilitas ibadah yang memadai, layanan akomodasi bebas dari aktivitas yang dilarang dalam Islam (seperti alkohol dan perjudian), serta tata kelola destinasi wisata yang menjaga nilai-nilai etika Islami. Pertumbuhan pasar wisatawan Muslim menjadi salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya pariwisata halal. Menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI), jumlah wisatawan Muslim dunia terus meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan mencapai lebih dari 200 juta wisatawan pada tahun-tahun mendatang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pariwisata halal bukan hanya tren, tetapi telah menjadi kebutuhan nyata dalam industri pariwisata global. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing pariwisata suatu negara, tetapi juga menjadi sarana dakwah, penguatan ekonomi umat, serta upaya membangun citra positif Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci suatu fenomena atau kondisi tertentu. Untuk memperkuat data analisis, tulisan ini juga menggunakan beberapa artikel penting yang mengkaji tentang pemahaman asuransi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab dan menganalisis dari sudut pandang tentang Pariwisata Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pariwisata Halal

Pariwisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan Organization of the Islamic Conference (selanjutnya disebut OKI) atau dalam bahasa

Indonesia sering disebut sebagai Organisasi Konferensi Islam, sebagai wadah peningkatan solidaritas Islam antarnegara. Selama pertemuan, OKI telah mengusulkan aktivitas wisata di negara-negara Islam untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan negara-negara tersebut. Pariwisata halal merupakan suatu permintaan yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan beragama Islam selama liburan, selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. (FIRMANSYAH, 2023)

Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2, yaitu: "Wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah Islam." Syariah Islam memberikan panduan yang baik, termasuk dalam kegiatan pariwisata, seperti makanan dan minuman yang bersih dan sehat, fasilitas yang baik, tempat wisata yang tidak memperbolehkan campuran antara wanita dan pria yang bukan muhrim agar tidak terjadi tindakan asusila, serta waktu kunjungan yang tidak sampai larut malam untuk menjaga kesehatan dan hal-hal lainnya.

Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir adalah wisata yang seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip nilai Islam syariah. Mulai dari niat melakukan wisata hanya untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama perjalanan tetap menjalankan ibadah, setelah tiba di tempat tujuan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah, memakan dan minum yang halal dan baik, hingga saat kembali dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah. (Panisa et al., 2025)

B. Sumber Hukum Tentang Pariwisata halal

Segala sesuatu yang ada di bumi dan dilangit telah memiliki aturannya masing-masing, yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum disini maksudnya ialah payung hukum atau sebuah peraturan yang menaungi segala macam hal, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan pariwisata dan atau pariwisata halal. TAP MPR No III/MPR/2003 yang dimaksud dengan sumber hukum ialah sumber yang akan dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengacu pada sumber hukum nasional yaitu Pancasila.

Sumber hukum yang menjadi landasan terkait pariwisata dan atau pariwisata halal ialah Al-Quran dan As-Sunnah terkait, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan pengertian pariwisata dan segala macam hal yang berkaitan dengan kepariwisataan dan juga sebagai landasan untuk pelaksanaan pariwisata di Indonesia, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbicara terkait produk apa saja yang dapat di berikan label halal, syarat-syaratnya, dan juga bagaimana mekanismenya. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, PP ini merupakan Lex Specialis (aturan khusus) yang di buat pemerintah untuk kemudian menjadi langkah konkrit dalam mengatur mekanisme pelaksanaan pariwisata halal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Peran pariwisata Halal dalam Ekonomi Berkelanjutan

Kontribusi ekonomi dari industri pariwisata halal menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi berkelanjutan. Pariwisata halal telah tumbuh sebagai segmen yang signifikan dalam industri pariwisata global, menghasilkan dampak ekonomi yang positif di berbagai tingkat. Kontribusi ekonomi pariwisata halal terlihat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengeluaran yang dibawanya. Wisatawan muslim, yang semakin sadar akan kebutuhan akan pengalaman perjalanan yang sesuai dengan keyakinan agama, cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan-layanan pariwisata yang memenuhi standar halal. Ini mencakup biaya akomodasi, makanan, transportasi, dan berbagai kegiatan wisata. Pariwisata halal juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di destinasi wisata. Dalam menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan tantangan ekonomi, industri pariwisata halal dapat memberikan solusi dengan menciptakan peluang pekerjaan di berbagai sektor terkait (Al Mustaqim, 2023).

Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata halal juga cenderung bersirkulasi di dalam komunitas lokal. Ini mengarah pada multiplier effect, di mana uang yang dihabiskan

oleh wisatawan akan berdampak pada berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan lokal, transportasi, pertanian, dan kerajinan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan yang berasal dari industri pariwisata halal memiliki dampak yang meluas dan positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak ekonomi pariwisata halal juga merembes ke sektor-sektor ekonomi terkait. Permintaan akan makanan dan minuman halal, misalnya, mendorong perkembangan industri makanan halal yang mencakup produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk halal. Ini berdampak pada pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasokan makanan halal. Dampak positif ini juga mencakup pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Kebutuhan akan fasilitas ibadah, tempat berdoa, dan kamar mandi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mendorong investasi dalam pembangunan dan perawatan fasilitas-fasilitas ini. Ini dapat berdampak positif pada sektor konstruksi dan perhotelan, serta berkontribusi pada perbaikan lingkungan destinasi wisata secara keseluruhan (Al Mustaqim, 2023).

C. Hambatan, Tantangan, dan Strategi Pengembangan Pariwisata Halal

A. Hambatan

- a. Hambatan pertama yaitu ditemukan pada aspek kelembagaan dalam penyediaan sumberdaya manusia yang belum siap untuk melakukan pengembangan pariwisata halal dan kurangnya pemahaman secara mendalam tentang konsep pengembangan pariwisata halal.
- b. Hambatan kedua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi pemuda pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi penghambat pengembangan pariwisata halal, sehingga menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (khususnya pemuda) masih belum memadai dalam pengembangan pariwisata halal. Kurangnya partisipasi masyarakat dan banyaknya gangguan keamanan seperti pencopetan juga menjadi penghambat pengelolaan pengembangan pariwisata halal.
- c. Hambatan ketiga yaitu kurangnya inovasi program promosi pariwisata halal. Kurangnya inovasi dalam program promosi atau pemasaran pariwisata halal dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata halal. Minimnya ketersediaan informasi yang memadai tentang lokasi wisata halal mengakibatkan unsur digital presence sebagai upaya unsur identitas memiliki poin yang rendah.
- d. Hambatan keempat ditemukan pada penyediaan fasilitas yang kurang memadai, selain dari kurang optimalnya aspek kelembagaan pada sumber daya manusia, penyediaan fasilitas sarana prasarana pariwisata halal yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pengembangan pariwisata halal. Contohnya, pada penyediaan fasilitas ibadah yang masih kurang memadai, tempat wudhu yang terbatas dan jauh untuk dijangkau serta kebersihan mushola yang masih rendah menjadi penghambat pengembangan pariwisata

B. Hambatan

- a. Tantangan pertama yaitu belum adanya regulasi tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Tantangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia disebabkan karena belum adanya regulasi yang komprehensif tentang seperangkat peraturan perundang-undangan tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah di Indonesia.
- b. Tantangan kedua yaitu kurangnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman serta pada hotel maupun restoran. Tantangan juga dapat disebabkan karena kurangnya sertifikasi halal pada hotel, restoran, produk makanan maupun minuman dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada destinasi pariwisata halal. Selain itu, belum diterapkannya penggunaan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, Lembaga pembiayaan,

lembaga penjaminan, maupun dana pensiun juga menjadi hambatan pada pengembangan wisata halal (Wulandari, 2021).

C. Strategi

- a. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas halal merupakan langkah penting dalam menciptakan destinasi pariwisata ramah Muslim. Hal ini meliputi penyediaan akomodasi, fasilitas ibadah, serta makanan dan minuman yang sesuai dengan standar halal dan *thayyib*. Infrastruktur halal bukan hanya mendukung kenyamanan wisatawan, tetapi juga selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* seperti pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), harta (*Hifz al-Mal*), dan keturunan (*Hifz al-Nasl*).
- b. Promosi destinasi pariwisata halal berperan penting dalam menarik wisatawan Muslim global dengan menonjolkan nilai agama, kenyamanan, budaya, dan keindahan alam. Strategi promosi dapat dilakukan melalui media sosial, platform digital, dan kampanye kreatif yang menampilkan fasilitas halal, pengalaman budaya, serta interaksi dengan masyarakat lokal. Selain memperkuat citra destinasi ramah Muslim, promosi juga memberi dampak ekonomi signifikan, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan hingga peluang bagi UMKM di sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan kerajinan. Dengan pendekatan digital yang efektif dan berbasis nilai budaya, promosi pariwisata halal tidak hanya meningkatkan daya tarik global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan Masyarakat.
- c. *Islamic securities crowdfunding* memiliki potensi untuk memperkuat sektor keuangan syariah secara menyeluruh. Penggunaan mekanisme *crowdfunding* yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah akan membantu memperluas ekosistem keuangan syariah, sejalan dengan tujuan Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Dalam rangka mewujudkan potensi ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan melalui pengaturan regulasi yang mendukung dan memberi ruang bagi perkembangan *crowdfunding* dalam sektor pariwisata halal. Tidak hanya akan membantu meningkatkan kualitas destinasi wisata halal di Indonesia, tetapi juga akan memperkuat ekosistem industri halal secara menyeluruh. Dengan begitu, *Islamic securities crowdfunding* memiliki peluang untuk menjadi pendorong utama dalam pengembangan pariwisata halal yang berkesinambungan dan berwawasan Syariah (Al Mustaqim, 2023).
- d. Indonesia memiliki *halal tourism* yang lebih unggul dibandingkan negara lain. Namun, regulasi yang mengawasi *halal tourism* masih lemah dan belum memiliki pedoman khusus terkait pariwisata halal sebab regulasi yang berlaku bersifat umum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Hal-hal yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya sektor *halal tourism* adalah (1) Percepatan regulasi yang difokuskan pada *halal tourism*, (2) Koordinasi berkala pada pembaharuan regulasi-regulasi terkait *halal tourism* yaitu antara Kementerian Pariwisata dengan Majelis Ulama Indonesia, serta (3) Persiapan hal-hal pendukung selain percepatan regulasi *halal tourism*.

D. Standar dan Sertifikasi Halal Diterapkan Dalam Industri Pariwisata Untuk Menjamin Kehalalan Layanan Fasilitas

Pariwisata adalah sektor yang sangat vital bagi ekonomi Indonesia. Dengan beraneka ragam sumber daya alam dan warisan budaya, negara ini menyajikan berbagai pilihan tempat wisata yang menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pada wisata halal telah mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya minat dari pelancong Muslim yang mencari tempat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pariwisata halal mengacu pada aktivitas pariwisata yang menawarkan layanan dan fasilitas yang sejalan dengan ajaran syariah Islam. Ini melibatkan penyediaan makanan dan minuman yang

halal, fasilitas untuk beribadah yang memadai, lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam, serta layanan tambahan lainnya yang menjamin kenyamanan wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah dan kegiatan sehari-hari saat berlibur. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di seluruh dunia, sehingga memiliki peluang yang signifikan dalam pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip halal. Wisata halal sendiri bukan sekadar menawarkan makanan dan minuman yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mencakup akomodasi, fasilitas ibadah, layanan perjalanan, serta lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai Syariah (Pamungkas, 2025)

Indonesia berhasil menjadi peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal di dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023 dengan perolehan skor 73 dari 100. Semakin positif arah pertumbuhan dan prestasi pariwisata Halal di Indonesia, pemerintah menetapkan pedoman halal tourism agar tetap berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 guna mendukung pengembangan sektor halal tourism. Fatwa tersebut mengatur terkait prinsip umum, ketentuan para pihak dan akad, wisatawan, hotel syariah, spa, destinasi wisata, biro perjalanan wisata, massage dan sauna serta tour guide. Perkembangan industri halal secara tidak langsung dapat menciptakan tren tingkat global yang membutuhkan sertifikasi halal sebagai standar atau pedoman hidup di era modern sehingga konsumsi bukan lagi hanya terkait kepuasan dan keuntungan namun memaksimalkan *maslahah* (Winarti, 2017)

Indonesia memiliki halal tourism yang lebih unggul dibandingkan negara lain. Namun, regulasi yang mengawasi halal tourism masih lemah dan belum memiliki pedoman khusus terkait pariwisata halal sebab regulasi yang berlaku bersifat umum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Hal-hal yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya sektor halal tourism adalah (1) Percepatan regulasi yang difokuskan pada halal tourism, (2) Koordinasi berkala pada pembaharuan regulasi-regulasi terkait halal tourism yaitu antara Kementerian Pariwisata dengan Majelis Ulama Indonesia, serta (3) Persiapan hal-hal pendukung selain percepatan regulasi halal tourism.

KESIMPULAN

Pariwisata halal adalah layanan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, mencakup fasilitas makanan halal, tempat ibadah, dan layanan yang mendukung aktivitas sesuai ajaran Islam. Pariwisata halal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata halal menghadapi hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia terampil dan fasilitas yang memadai, namun dengan strategi tepat seperti peningkatan infrastruktur dan promosi, pariwisata halal dapat menjadi sektor ekonomi yang penting dan berkelanjutan, terutama di Indonesia sebagai destinasi wisata halal utama dunia

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. In *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* (Vol. 1, Issue 1, pp. 26–43). <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>
- FIRMANSYAH, M. R. (2023). POTENSI PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 183(2), 153–164.
- Pamungkas, P. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.61696/juparita.v3i1.634>
- Panisa, P., Khatima, H., Nasution, S. J., & Harahap, N. (2025). Keunggulan Asuransi Umum Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24903/je.v14i1.3240>
- Winarti, O. (2017). *Halal Tourism in Indonesia: Does it attract only Muslim Tourists?* 1, 232–239. <https://doi.org/10.25139/JSK.V1I3.139>

Wulandari, R. D., & Indahsari, K. (2021). (HALAL TOURISM) PADA DESTINASI WISATA LERENG GUNUNG WILIS KABUPATEN MADIUN SKRIPSI Oleh : LAYIN LIA FEBRIANA NIM 210717134 Pembimbing Dr . LUHUR PRASETIYO , S . Ag ., M . E . I . JURUSAN EKONOMI SYARIAH. In *1st E-proceeding SENRIABDI 2021* (Vol. 1, Issue 1, pp. 329–343).